

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGANGGURAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI
BALI**

**Ita Aristina¹
Made Kembar Sri Budhi²
I G.A.P. Wirathi³
Ida Bagus Darsana⁴**

^{1,2,3,4}Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: itakaristina@gmail.com / telp: +62 82247105150

ABSTRAK

Kemiskinan menjadi masalah besar di Provinsi Bali. Masalah kemiskinan tidak dapat dituntaskan dalam waktu singkat di karenakan kemiskinan merupakan masalah multisektor yang menyangkut berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan maupun tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial tingkat pendidikan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi non partisipan. Data diolah dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil uji dengan Eviews 6 memperoleh hasil Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh simultan dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. Secara parsial variabel Tingkat Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali, sementara variabel Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali.

Kata Kunci: *tingkat pendidikan; pengangguran; pertumbuhan ekonomi; kemiskinan*

ABSTRACT

Poverty is a big problem in the province of Bali. The problem of poverty can not be accomplished in a short time in because poverty is a multisectoral problem that involves many sectors of society, ranging from health, education and labor. This study aims to determine the effect of simultaneous and partial levels of education, unemployment, economic growth on poverty. The data used in this research is secondary data. The data collection is done by non-participant observation. Data processed by multiple linear regression analysis. The test results with the results obtained Eviews 6 Level of Education, Unemployment and Economic Growth simultaneous and significant influence on Poverty in the province of Bali. In partial, Education Level and Economic Growth significant negative effect on Poverty in the province of Bali, while the unemployment variable positive and significant effect on Poverty in the province of Bali.

Keywords: *levels of education, unemployment, economic growth, poverty*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sukmaraga, 2011). Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu Negara yang menjadi agenda setiap tahunnya. Menurut Arsyad (1999), pembangunan ekonomi adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia (Putri, 2013). Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan (Suliswanto, 2010). Faktor-faktor seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendidikan dan kemiskinan satu sama lain saling terkait dimana kemiskinan telah mejadi perhatian utama dalam perkembangan kebijakan sosial (Alcock, 2012).

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan

waktu. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Menurut Nilsen (2007) kemiskinan akan membatasi kemampuan individu untuk tetap sehat dan mengembangkan keterampilannya. Masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang berkepanjangan, menurut BPS Provinsi Bali (2012) penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu, penduduk miskin mempunyai sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas yang rendah, adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas yang rendah berarti produktifitas menjadi rendah sehingga berpengaruh kepada upah yang diterima, dan adanya perbedaan akses dalam modal (Kuncoro, 2004).

Selama satu dekade terakhir Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan, pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan ekonomi adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur (Sumarto, 2014). Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan juga diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang tertinggal. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah kemiskinan.

Jhon Stuart Mill seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan inggris dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan makanan sebagai suatu aksioma, namun demikian Jhon Stuart Mill berpendapat bahwa pada suatu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya, jika produktifitas seseorang tinggi maka terdapat kecendrungan memiliki keluarga kecil (fertilitas rendah). Mill menyanggah bahwa kemiskinan tidak dapat dihindarkan akibat pengaruh pertumbuhan penduduk, jika suatu waktu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan tersebut hanyalah bersifat sementara dan dapat ditanggulangi dengan mengimpor makanan atau memindahkan penduduk ke daerah lain.

Jhon Stuart Mill menyarankan peningkatan pendidikan sehingga penduduk lebih rasional sehingga mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada (Sukirno, 2006). Memperhatikan bahwa tinggi rendahnya tingkat kelahirann ditentukan oleh manusia itu sendiri, maka Mill menyarankan untuk meningkatkan tingkat golongan yang tidak mampu. Meningkatnya pendidikan penduduk maka secara rasional maka mereka mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada. Di samping itu Mill berpendapat bahwa umumnya perempuan tidak menghendaki anak yang banya, dan apabila kehendak mereka diperhatikan maka tingkat kelahiran akan rendah.

Selain itu, penurunan pengangguran diharapkan juga mampu menurunkan jumlah kemiskinan. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka

belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 1997). Selain itu, menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara apabila rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*.

Sianturi (2011) menyatakan bahwa pengertian kemiskinan telah mengalami perkembangan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut, maka indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya juga terus bertambah. Kemiskinan tidak lagi hanya dilihat dari aspek ekonomi masyarakat melainkan telah meluas hingga ke dimensi social, kesehatan, pendidikan, dan politik. Menurut Sen (1999), lebih kepada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar dalam hidup yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Menurut Verner (2006) kemiskinan merupakan rumah tangga yang kurang berpendidikan. Rumah tangga yang tidak miskin adalah mereka yang pendapatannya berada di atas garis kemiskinan (Khrisna *et al*, 2007).

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan

serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif (Simatupang dan Dermoredjo, 2003).

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat

kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Kondisi kesehatan bagi masyarakat miskin pada umumnya tidak begitu baik ataupun buruk, dan banyak dari mereka yang buta huruf, serta menganggur (Suputra, 2016). Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang kompleks dan sudah berakar pada berbagai sektor dan kondisi (Panji, 2016). Bagi masyarakat miskin, pemenuhan hak dasar atas pekerja yang layak ditentukan dari ketersediaan lapangan kerja yang dapat diakses, kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha, serta melindungi pekerja dari eksploitasi dan ketidakpastian kerja. Masyarakat miskin umumnya memiliki masalah dalam mendapatkan kesempatan kerja dan usaha, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan (Astrini, 2013). Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja sehingga tingkat kemiskinan akan menurun (Ashcroft dan David, 2008).

Provinsi Bali adalah salah satu wilayah yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat, namun ditengah pesatnya perkembangan perekonomian yang terjadi, jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi. Kondisi ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, dan masih kekurangan bahan makanan, ini membuktikan bahwa kemiskinan di Bali perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pada kondisi saat ini, tingkat kemiskinan bukan hanya dipandang dari rendahnya kualitas ekonomi, tetapi sudah dipandang dari sudut yang berbeda-beda dan

tergantungan pandangan yang digunakan maka batasan kemiskinan juga telah bergeser.

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali terus berfluktuasi setiap tahunnya. Tetapi jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 sampai 2013 terus mengalami penurunan dari 7,08 persen menjadi 3,95 persen. Penurunan jumlah penduduk miskin Provinsi Bali merupakan dampak positif dari kebijakan pembangunan seluruh sektor khususnya program pemberdayaan masyarakat miskin. Adanya peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 menjadi 4,53 persen, hal ini disebabkan karena terjadinya penambahan angkatan kerja dan perubahan batas garis kemiskinan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 1995-2014

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin				
	(000) Jiwa	(%)	Tahun	(000) Jiwa	(%)
1995	216.4	6,08	2005	228.4	6,72
1996	227.0	7,31	2006	243.5	7,08
1997	239.4	8,31	2007	229.1	6,63
1998	246.2	8,44	2008	215.7	6,17
1999	257.8	8,53	2009	181.7	5,13
2000	176.8	5,68	2010	174.9	4,88
2001	248.4	7,87	2011	165.8	4,2
2002	221.8	6,89	2012	166.9	4,18
2003	246.1	7,34	2013	159.9	3,95
2004	231.9	6,85	2014	185.2	4,53

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2015

Pembangunan manusia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Hampir tidak ada yang membantah bahwa

pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan. Jika dunia pendidikan tidak diperhatikan secara maksimal, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia. Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau mengalami kebodohan bahkan secara sistematis (Wiguna, 2013). Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau mengalami kebodohan bahkan secara sistematis. Karena itu, penting untuk memahami bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan (Wijayanto, 2010).

Hubungan pendidikan dengan kemiskinan sangat berpengaruh, karena semakin tinggi pendidikan seseorang, maka keahlian juga meningkat sehingga akan mendorong produktivitas kerja (Astrini, 2013). Pendidikan perlu mendapatkan sorotan dalam mengatasi kebodohan serta ketertinggalan sosial ekonominya. Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen yang terkait dalam penyebab kemiskinan (Iswara, 2014). Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan penduduk, karena dalam pembangunan saat ini diperlukan partisipasi dari penduduk yang terdidik dan terampil agar dapat berpartisipasi penuh dalam sebuah pembangunan. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herry Faizal (2013) dikatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kalimantan barat.

Tabel 2. Pendidikan penduduk menurut rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali Tahun 1995-2014

Tahun	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Perkembangan (%)	Tahun	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Perkembangan (%)
1995	6,2	-	2005	7,4	1,37
1996	6,3	1,61	2006	7,4	0
1997	6,5	3,17	2007	7,5	1,35
1998	6,7	3,08	2008	7,7	2,67
1999	6,8	1,49	2009	7,8	1,3
2000	7,2	5,88	2010	8,21	5,26
2001	7,4	2,78	2011	8,35	1,71
2002	7,6	2,7	2012	8,42	0,84
2003	7,5	-1,32	2013	8,68	3,09
2004	7,3	-2,67	2014	8,11	3,76

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2016

Berdasarkan Tabel 2 perkembangan kondisi pendidikan menurut rata-rata lama sekolah secara umum kondisi pendidikan di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan dari 1995-2014 diasosiasikan dengan meningkatnya pencapaian pendidikan dan peningkatan pendapatan dari tenaga kerja terdidik. Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah berpengaruh besar terhadap menurunnya tingkat kemiskinan. Hal tersebut dapat dikatakan pembangunan melalui pendidikan dapat dikatakan sangat penting agar menekan tingkat kemiskinan. Selain itu agar penduduk memperoleh pekerjaan yang baik harus disertai pendidikan dan keahlian yang baik. Data pada Tabel 1.2 perkembangan pendidikan menurut rata-rata lama sekolah mengalami fluktuasi, di tahun 2003 dan 2004 perkembangan menjadi -1,32 persen dan -2,67 persen. Selain itu perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 5,88 persen.

Pengangguran didefinisikan adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak diperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2004).

Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk baik terhadap perekonomian, seperti pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai. Pengangguran dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya keterampilan dan pengangguran menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan politik (Nanga, 2005). Pengangguran adalah masalah ketenagakerjaan yang sering dihadapi oleh setiap negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Menurut BPS pada sensus 2010, pengangguran didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64) tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Pengangguran jika dibiarkan secara terus menerus tentunya akan berdampak negatif bagi suatu daerah atau negara. Contoh dampak negatif yang terjadi akibat banyaknya pengangguran adalah kriminalitas dan kemiskinan (Haffizh P, 2015).

Keterkaitan antara tenaga kerja dan kemiskinan dalam hal ini akan didekati dengan melihat hubungan antara kemiskinan dan pengangguran dan antara kemiskinan dan pengangguran. Pemilihan indikator pengangguran dan setengah pengangguran didasari pada kenyataan bahwa kedua indikator tersebut terkait langsung dengan tingkat pendapatan. Seseorang yang menganggur tentunya tidak memiliki pendapatan dari pekerjaan, sementara setengah pengangguran berkaitan erat dengan rendahnya jam kerja dan pendapatan. Secara teoritis, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Dalam hal ini ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat. Hubungan yang positif antara kemiskinan dan pengangguran. Ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat

kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut turun.

Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat, jika suatu masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan atau kesejahteraannya tinggi, namun di dalam masyarakat ada juga yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran secara otomatis akan mengurangi kesejahteraan suatu masyarakat yang secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Menurut Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu Negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Astriani dan Purbadharmaja (2013) menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan yang artinya semakin tinggi tingkat pengangguran maka kemiskinan akan meningkat. Berikut ini adalah Tabel Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran di Provinsi Bali tahun 1995-2014.

Tabel 3. Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran Tahun 1995 – 2014

Tahun	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran (orang)	Pengangguran (%)
1995	1.663.334	1.603.993	30.418	1,8
1996	1.646.406	1.584.827	61.579	3,7
1997	1.691.281	1.645.408	45.873	2,7
1998	1.674.454	1.597.179	77.275	4,6
1999	1.765.779	1.702.941	62.838	3,6
2000	1.752.769	1.712.954	39.815	2,3
2001	1.629.917	1.583.917	144.737	8,9
2002	1.777.909	1.715.452	62.457	3,5
2003	1.910.054	1.765.317	144.737	7,6
2004	1.924.805	1.835.165	89.640	0,5
2005	2.002.171	1.895.741	106.430	0,5
2006	1.990.476	1.870.288	120.188	6,03
2007	2.059.711	1.982.134	77.577	3,8
2008	2.099.278	2.029.730	69.548	3,3
2009	2.123.588	2.057.118	66.470	0,3
2010	2.246.149	2.177.358	68.791	3,1
2011	2.224.874	2.159.158	65.716	2,9
2012	2.300.705	2.252.475	48.230	0,2
2013	2.283.896	2.242.076	41.820	0,18
2014	2.316.758	2.272.632	44.126	1,9

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2016

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat angka pengangguran di Provinsi Bali paling rendah pada tahun 1995 sebanyak 30.418 orang dan angka pengangguran paling tinggi terjadi pada tahun 2001 sebanyak 144.737 orang. Pengangguran muncul karena rendahnya tingkat pertumbuhan permintaan terhadap tenaga kerja di semua sektor dan tingkat pertumbuhan yang cepat dari persediaan tenaga kerja kota yang berasal dari desa (Todaro,1995). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Perkembangan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Bali tahun 1995-2014 ditunjukkan pada Tabel 1.5. Berdasarkan Tabel 1.5 jumlah PDRB mengalami peningkatan yang dilihat dari sisi laju pertumbuhan PDRB Provinsi Bali pada Tahun 1995-2014. Jika di lihat

pertumbuhan PDRB, pada tahun 2014 terjadi penurunan yakni sebesar 5.58 persen. Pertumbuhan ekonomi Bali berdasarkan tahun dasar 2010 berada diatas pertumbuhan secara Nasional yang hanya sekitar 5 persen.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Bali

Tahun	PDRB (Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tahun	PDRB (Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1995	51.266.868	-	2005	71.170.629	5,56
1996	55.450.245	8,16	2006	74.928.438	5,28
1997	58.671.904	5,81	2007	79.364.202	5,92
1998	56.301.559	-4,04	2008	84.102.244	5,97
1999	56.678.780	0,67	2009	88.548.894	5,33
2000	58.401.814	3,04	2010	93.749.394	5,83
2001	60.387.476	3,4	2011	99.991.631	6,49
2002	62.223.255	3,04	2012	106.951.465	6,65
2003	64.444.626	3,57	2013	114.103.580	6,05
2004	67.421.967	4,62	2014	121.779.125	5,58

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2015

Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu Negara. Setiap Negara telah berusaha menurunkan angka kemiskinan. Syarat utama terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi (Jonaidi, 2012). Alat ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (Wahyuni, 2014). Sumber pertumbuhan ekonomi dapat terdiri dari kenaikan kualitas dan jumlah tenaga kerja, penambahan modal melalui investasi, serta adanya penyempurnaan teknologi (Setyadi, 2009). Jika semua sumber pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dipenuhi, maka kondisi ekonomi akan stabil (Wijayanti, 2014).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah 1) untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap kemiskinan di

Provinsi Bali periode tahun 1995-2014, 2) untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Bali periode tahun 1995-2014.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Bali, karena Provinsi Bali masih banyak terdapat penduduk miskin yang penyebarannya tidak merata di berbagai wilayah di Provinsi Bali. Penelitian ini memfokuskan kepada Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Bali sebagai obyek penelitian.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat pendidikan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Bali periode tahun 1995-2014. Pada penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (*dependent variabel*) dan tiga variabel bebas (*independent variabel*). Variabel terikat (*dependent variabel*) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009:5). Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Kemiskinan (Y). Variabel bebas (*independent variabel*) yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2007:33). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Tingkat Pendidikan (X1), Pengangguran (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3).

Data kualitatif menurut Sugiyono (2013), merupakan penjelasan-penjelasan maupun uraian-uraian. Penelitian ini menggunakan data-data kualitatif, dimana

data tersebut berkaitan dengan gambaran-gambaran umum mengenai kondisi di Provinsi Bali serta ulasan landasan teori. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data rata-rata lama sekolah, pengangguran, pdrb, dan penduduk miskin tahun 1995-2014 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data berupa dokumen-dokumen ataupun catatan-catatan yang telah diolah oleh pihak-pihak terkait sehingga dapat digunakan untuk kepentingan analisis (Sugiyono, 2013). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data Rata-rata lama sekolah, Pengangguran, PDRB, dan Penduduk Miskin tahun 1995-2014 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2013;204). Data yang dikumpulkan melalui metode ini adalah dengan cara melakukan pengamatan dan mencatat serta mempelajari uraian-uraian dari buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi dan mengakses data dari perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Menurut Gujarati (2006:91), persamaan regresi linear berganda dapat dinyatakan dalam persamaan berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \mu \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y = kemiskinan
- X1 = tingkat pendidikan

X ₂	= pengangguran
X ₃	= pertumbuhan ekonomi
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= koefisien regresi parsial
β_0	= intersep (konstanta)
μ	= kesalahan pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Tingkat Pendidikan (X_1), Pengangguran (X_2), dan $\widehat{\text{Pertumbuhan Ekonomi}}$ (X_3) terhadap Kemiskinan (Y) dengan menggunakan *Eviews Versi 6*. Berdasarkan hasil analisis maka di peroleh persamaan model regresi variabel terikat dan bebas diatas adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 Y &= 2,753 + 1,464X_1 + 0,311X_2 - 0,383X_3 \\
 Se &= (1,961) \quad (1,215) \quad (0,325) \quad (0,214) \\
 t &= \quad \quad (1,204) \quad (1,957) \quad (-1,988) \\
 Sig &= \quad \quad (0,245) \quad (0,002) \quad (0,001) \\
 R^2 &= 0,532 \\
 F &= 16,177, \quad \text{nilai } F\text{-value} = 0,000
 \end{aligned}$$

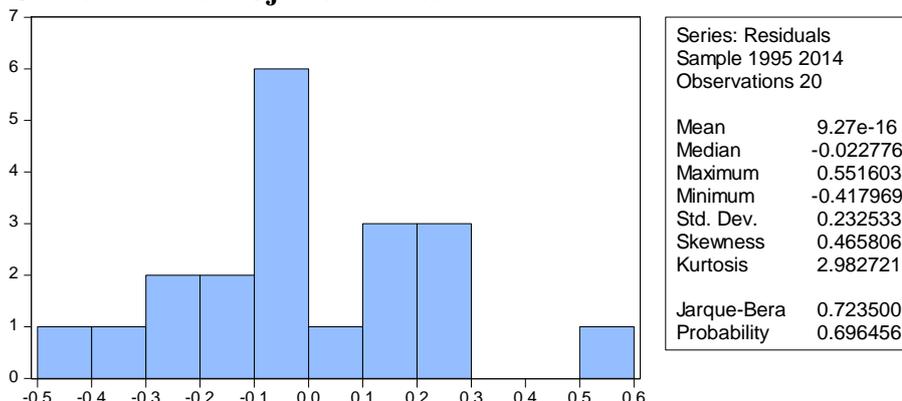
Koefisien regresi variabel pengangguran (X_2) terhadap kemiskinan (Y) sebesar 0,311 persen memiliki arti bahwa jika pengangguran meningkat sebesar 1 orang maka kemiskinan akan meningkat sebesar 0,311 persen orang dengan asumsi variabel pendidikan dan pertumbuhan ekonomi konstan. Koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi (X_3) terhadap kemiskinan (Y) sebesar -0,383 persen memiliki arti bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1 persen maka kemiskinan akan menurun sebesar -0,383 persen orang dengan asumsi pendidikan dan pengguran konstan.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Teknik analisis regresi linier berganda memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari empat, diantaranya adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Keempat uji tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji residual dari model regresi yang dibuat apakah berdistribusi normal atau tidak (Suyana Utama, 2009). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Terpenuhi atau tidaknya uji normalitas dapat diuji dengan melakukan uji statistik Jarque-Bera yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah, 2016

Besarnya nilai Jarque-Bera adalah 0,723 dengan nilai *p-value* sebesar 0,696. Nilai tersebut menyatakan bahwa data berdistribusi normal, karena nilai *p-value* Jarque-Bera sebesar 0,696 lebih besar dari $\alpha = 5$ persen.

Hasil pengujian dengan *auxiliary* yaitu menguji korelasi parsial antar variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan variabel terikat kemiskinan memiliki nilai R-square model awal sebesar 0.532 dan hasil pengujian variabel bebas. Tabel

5 menunjukkan bahwa dari hasil dari auxiliary regression masing-masing variabel, di peroleh nilai R^2 masing-masing antara variabel bebas lebih kecil dari R^2 estimasi awal sebesar 0.532. Hasil ini menunjukkan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model.

Tabel 5. Nilai R^2 Auxiliary Regression

Variabel terikat	Variabel bebas	R^2 auxiliary regression
Y	X1, X2, X3	0.532
X1	X2, X3	0.342
X2	X1, X3	0.208
X3	X1, X2	0.361

Sumber: Data diolah, 2016

Menurut Suyana Utama (2009:94), uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain di model regresinya. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji White Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam regresi dapat dilihat dari nilai *p-value* Obs* R-squared lebih besar dari 5 persen, berarti bahwa model yang dibuat tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	2.212883	Probability	0.1462
Obs*R-squared	4.803888	Probability	0.0905

Sumber: Data diolah, 2016

Pada Tabel 6 yang menunjukkan hasil nilai *p value* Obs*R-squared sebesar 0.090 lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas antara variabel pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Suyana Utama (2009:92), uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui korelasi autokorelasi atau pengaruh data di dalam model regresi. Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi residual yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross sectional*). Untuk melacak adanya autokorelasi atau pengaruh data dari pengamatan sebelumnya dalam model regresi dilakukan uji autokorelasi. Jika nilai p (p value) dari nilai observasi *R-square lebih besar dari 5 persen, berarti bahwa model yang dibuat tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	2.039686	Probability	0.166960
Obs*R-squared	4.512737	Probability	0.104730

Sumber: Data diolah, 2016

Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai p (p value) dari nilai Obs* R-squared sebesar 0,104 lebih besar dari 5 persen atau 0,05 artinya tidak terjadi autokorelasi antara variabel pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Simultan Variabel Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Hasil analisis uji statistik dengan menggunakan program *Eviews Versi 6* diperoleh nilai F hitung sebesar 16,177 > F tabel sebesar 3,24 dan *probability F value* sebesar 0,000 < dari $\alpha = 5$ persen maka H_0 di tolak dan H_1 diterima, yang artinya pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 1995-2014. Hasil ini didukung oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,5327 yang memiliki arti bahwa 53,27 persen variasi dari kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 1995-2014 dijelaskan oleh pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan 46,73 persen sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model.

Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali

Berdasarkan nilai t hitung sebesar 1,204 lebih besar dari t tabel -1,745 dan nilai probability p value sebesar $0,245 > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak yang berarti bahwa variabel pendidikan (X_1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil perhitungan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Menurut Todaro (2006: 434) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Selanjutnya menurut Bank Dunia (2013) (dalam Nirwana, 2013) pendidikan merupakan salah satu instrumen yang paling ampuh untuk mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang difokuskan pada rata-rata lama sekolah tidak mempengaruhi kemiskinan karena rata-rata penduduk Provinsi Bali yang buta huruf berusia relatif cukup tua yang pada masa mudanya tidak mengenyam pendidikan, dan kebanyakan terjadi di daerah pedesaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berkaitan erat dengan tingkat pendidikan atau bisa dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka akan semakin tinggi pula TPAK nya. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, kesempatan sebagai tenaga kerja untuk bisa masuk ke pasar tenaga kerja menjadi lebih siap dan peluang masuk pada pos-pos tertentu di dunia usaha semakin terbuka. Tetapi

kenyataannya TPAK pedesaan lebih tinggi daripada TPAK perkotaan untuk seluruh tingkat pendidikan yang ditamatkan. Hal ini dikarenakan tenaga kerja dipedesaan utamanya di sektor pertanian dan informal tidak membutuhkan pendidikan khusus. jumlah tenaga kerja yang diserap pada daerah pedesaan jauh lebih tinggi dari pada perkotaan untuk jenjang pendidikan tidak sekolah, tidak tamat SD, dan SLTP. Hal ini membuktikan bahwa meskipun pendidikan rendah tetapi masih dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan hidup melalui sektor informal. Hal ini penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Maahsunah (2012) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali

Berdasarkan nilai t hitung sebesar 1,957 lebih besar dari t tabel 1,746 dan nilai probability nilai p -value sebesar $0,002 > \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima yang berarti bahwa variabel pengangguran (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, dan berakibat pada tidak adanya pendapatan yang akhirnya dapat menyebabkan kesejahteraan akan semakin merosot. Semakin menurun kesejahteraan akibat menganggur, dapat mengakibatkan peluang terjebak dalam kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pendapat Arsyad (2010: 359) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata.

Tingginya angka pengangguran, secara ekonomi berpotensi mengurangi kesempatan dalam peningkatan produktivitas regional, dan secara sosial

mencerminkan semakin besarnya beban bagi masyarakat. Dengan demikian secara perlahan masyarakat akan terdorong pada kelompok penduduk miskin. Permana dan Arianti (2012) penelitiannya juga menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh langsung dan signifikan berdampak pada kemiskinan. Pedoman yang digunakan sebagai acuan adalah pendapat dari Sukirno (2004) yang menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang.

Banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa sumber utama kemiskinan adalah pengangguran. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu daerah sangat buruk, kekacaun politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali

Berdasarkan nilai t hitung sebesar -1,988 lebih kecil dari t tabel -1,746 dan nilai probability nilai p-value sebesar $0,001 < \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima yang berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Kuznet (Tulus Tambunan, 2001), yang menyatakan pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang

miskin berangsur-angsur berkurang. Deni Tisna (2008) menyatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Siregar (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Balisacan (2003), yang menyatakan terdapat hubungan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Namun dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, tidak serta merta selalu diikuti dengan penurunan jumlah kemiskinan. Kondisi ini terjadi karena terdapat factor lain yang membuat masyarakat miskin terpisah dari dampak pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya pemerintah menargetkan agar pembangunan dilakukan secara merata terhadap fasilitas ataupun sarana dan prasarana yang dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan variabel bebas yaitu tingkat pendidikan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan di Provinsi Bali pada Tahun 1995-2014. Secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali pada Tahun 1995-2014. Secara

parsial pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali pada Tahun 1995-2014.

Saran

Upaya untuk memerangi kemiskinan pemerintah mengeluarkan berbagai program perlindungan sosial. Mulai dari bantuan secara langsung dalam bentuk tunai, perbaikan tempat tinggal hingga pemberdayaan ekonomi. Semua ini dilakukan untuk memberi lebih banyak jalan kaum miskin keluar dari labirin kemiskinan mereka. Solusi multidimensi inilah yang diharapkan memberikan harapan dari kelangkaan yang mereka alami. Pemerintah di harapkan serius menangani masalah pendidikan dengan memberikan beasiswa pendidikan sepenuhnya bagi masyarakat miskin di Provinsi Bali agar semua masyarakat yang tergolong miskin dapat menyelesaikan pendidikannya, maka dengan itu masyarakat miskin memperoleh pengetahuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menganggur dan pengangguran dapat teratasi dengan terciptanya lapangan pekerjaan, selain itu juga jika tingkat pendidikan tinggi dan pengangguran menurun maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali akan meningkat.

REFERENSI

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Penerbit BP STIE YKPN.
- Ashcroft, Vincent dan David Cavanough. 2008. Survey of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(3), pp: 335-363.
- Astrini, Ni Made Myanti dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2013. Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi

Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(8), pp: 384-392.

Badan Pusat Statistik. 2014. *Bali Dalam Angka Tahun 1995-2014*. Bali: BPS.

Gujarati, Damodar. (2003). *Ekonometrika Dasar*. (Drs. Ak. Sumarno Zain, MBA. Terjemahan). Jakarta : Erlangga. Buku asli diterbitkan tahun 1978.

Iswara, I Made Anom Dan I Gusti Bagus Indrajaya. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali Tahun 2006 – 2011. *E-Jurnal EP Unud*, 3(11), h: 492-501.

Klasen, S. 2008. Economic Growth and Poverty Reduction. *World Development*, 36 (3): 420-444.

Kuncoro Mudrajad. 1997. *Ekonomi pembangunan: teori, masalah, dan kebijakan*. Sleman: Unit Penerbit dan Percetakan, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Okoroafor, Michael Onyedikachi. 2011. Poverty and Economic Growth In Nigeria. *Journal of University Of Calabar, Abia State Politechnic, ABA, Nigeria*.

Panji, I Putu Barat dan I Gusti Bagus Indrajaya. 2016. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 5(3), h: 316 – 337.

Prayuda, Mahanatha Giri dan Made Henny Urmila Dewi. 2015. Pengaruh Inflasi dan Investasi Terhadap Pengangguran di Provinsi Bali Tahun 1994-2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol 5 No 1.

Purba, Yofa Selvida Theresia dan Luh Putu Aswitari. 2016. Pengaruh Peran Sektor Non-Pertanian, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan. *E-Jurnal EP Unud*, 5(7), h : 799-824.

Putri, I. A. P. Septyana Mega dan Ni Nyoman Yuliarmi. 2013. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(10), pp: 441-448.

Rejekiingsih, Tri Wahyu. 2011. *Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*,(12)1,hal:28-44.

- Stephen, Faraz Hayat. 2014. Employment, unemployment, and underemployment in Africa. *Journal World Institute for Development Economics*.
- Sudewi, Ni Nyoman Ayu dan I. G. A, Putu Wirathi. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(3).
- Sukirno, Sadono. 1997. Teori Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukmaraga, Prima. 2011. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Sumarto, Sudarno. 2014. Explaining the Regional Heterogeneity of Poverty: Evidence From Decentralized Indonesia. *SMERU Research Institute, European Commission, The World Bank*.
- Suputra, I Putu Eka dan Ni Putu Martini Dewi. 2016. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Struktur Ekonomi Dan Belanja Pembangunan Terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(2), h: 105 – 112.
- Tambunan, Tulus H. 2001. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C, Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ke 8*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyuni, Putri Ayu. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol 3 No 8.
- Wijayanti, S., dan Ni Luh Putu Karmini. 2014. Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP UNUD*, 3 (10) h: 460-466.
- Wiguna, Van Indra. 2013. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.

Pengaruh Tingkat Pendidikan...[Ita Aristina, Made Kembar Sri Budhi]

World Bank. 2014. Siaran PERS: *Penurunan Kemiskinan di Indonesia Melambat, Ketimpangan Meningkat.*